

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOPPENG

Rahmawati

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email : aslinda110@yahoo.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinnaas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Soppeng. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si dan Bapak Dr. H. Muhammad Guntur,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implemntasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng belum terlaksana dengan baik dan belum berjalan sesuai dengan teori. Hal tersebut dilihat dari teori George C. Edwards III yang digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan tentang implementasi Implemntasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng yang ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

1.Latar Belakang

Perkembangan paradigma sistem pemerintah di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perkembangan paradigma tersebut ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah di kabupaten dan kota melalui pemberian kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek yang sangat menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah utamanya yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun tindakan masyarakat dalam mendirikan bangunan rumah tinggal harus sesuai dengan hukum.

Untuk membantu hal pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kab Soppeng mengambil suatu kebijakan yakni membuat unit pelayanan satu atap (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPMPTSP merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab Soppeng. DPMPTSP berperan dalam mengeluarkan IMB sedangkan disini Dinas yang mengurus secara teknis IMB yang akan diterbitkan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.

Pesatnya pembangunan di Kab Soppeng dengan lahan yang terbatas harus tetap dikendalikan salah satunya dengan IMB. Adapun tujuan pemberian IMB bermanfaat bagi pemerintah maupun yang mengajukan IMB. Bagi pemerintah, pemberian IMB bertujuan (1) untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan

yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, sekaligus untuk mengatur ketertiban. (2) sebagai sumber pendapatan daerah. Sementara bagi pemohon, IMB bertujuan untuk (1) adanya kepastian hukum (2) adanya kepastian hak (3) memudahkan mendapatkan fasilitas.

Oleh karena itu untuk menunjang tujuan dari adanya IMB maka pemerintah Kab Soppeng telah menetapkan peraturan untuk mengatur bagaimana pembangunan yang baik. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan meminimalisir permasalahan yang ada. Peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Daerah Kab Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung .

Peraturan Daerah ini serta merta membuat pemerintah daerah dituntut untuk berbenah untuk mengimplementasikan isi kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan tercapai. Setidaknya mengurangi dampak negatif dari pembangunan gedung dengan keterbatasan lahan yang ada yang rentan memicu konflik kepentingan antar swasta maupun antara kepentingan negara dengan kepentingan swasta.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015, izin mendirikan bangunan pasal 13 ayat 1 Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan ke bupati untuk melakukan kegiatan:

- a. Pembangunan bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung
- b. Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan /perawatan, perubahan , perluasan/pengurangan; dan
- c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Rencana Kab Soppeng untuk lokasi yang bersangkutan.

Pentingnya memperoleh izin mendirikan bangunan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pada bangunan yang dibangun agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Ketiadaan IMB ini cukup umum terjadi di masyarakat saat mendirikan bangunan. Alasannya bisa bermacam-macam seperti ketidaktahuan, keengganan mengurus, dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Yang juga kurang dipahami masyarakat adalah IMB bukan hanya diperlukan saat mendirikan, tetapi juga saat mengubah bangunan. Karena banyak bangunan yang tidak berizin hasilnya seringkali bangunan tidak tertata rapi, keindahan dan kenyamanan bangunan yang buruk dapat dilihat secara kasat mata. Selain itu, IMB juga menjadi syarat izin untuk mendapatkan izin lain dalam bangunan yang digunakan untuk tujuan komersil seperti izin usaha. Ketika IMB tidak terpenuhi artinya izin lain pun tidak terpenuhi dan terjadi banyak pelanggaran hukum. Dampaknya selain merugikan negara juga merugikan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maria Kurnia Sari dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan mengatur perkembangan bangunan yang ada di kota. Sehingga perkembangan yang ada dapat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan begitu keseimbangan akan terjaga.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian tentang implementasi kebijakan dengan menggunakan teori dari Model George Edward III. Melihat permasalahan yang ada, maka peneliti memilih judul Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng sebagai topik penelitian. Penelitian ini menjadi penting karena melihat bahwa bertambahnya

jumlah bangunan setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah bangunan yang memiliki IMB.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng"?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Secara umum Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Anderson dalam Hamdi (2013:36) mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.

Friedrich dalam Nur dan Muhammad (2019:08) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

b. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Dikatakan demikian, karena dalam hal perencanaan 20 persen keberhasilan, proses pengimplementasian 60 persen dan 20

persennya lagi adalah bagaimana untuk mengendalikan implementasi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut dipertegas oleh Udoji dalam Agustino (2016, hal. 129) dengan menuliskan bahwa:

“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (yang diterjemahkan secara bebas: Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan).

Menurut Gordon Mulyadi (2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah di seleksi.

c. Teori Implementasi Kebijakan

Edwards III dalam Mulyadi (2015:68), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan Proses Implementasi, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi atau Pelaksana dan Struktur Organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan yang berhubungan satu sama lain. empat faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu Dalam konteks komunikasi ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: 1) penyaluran (transmisi), 2) kejelasan kebijakan yang diimplementasikan sangat penting agar dapat diterima oleh para pelaksana, 3) perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan informasi.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, Merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980; 125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

5. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat melihat dan mengawasi setiap adanya pembangunan agar tidak ada lagi yang

membangun tanpa mengurus IMB. Berdasarkan Hasil Pengamatan ini tujuan dari adanya kebijakan IMB adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan, selain itu juga bangunanpun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Penelitian ini menghubungkan temuan hasil penelitian dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah teori George C. Edward III. Teori ini menjelaskan tentang faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Soppeng. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat hasil Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan dari kebijakan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal didalam perda. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isis kebijakan serta tidak jelasnya komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan..

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas PUPR Kabupaten Soppeng dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng menunjukkan komunikasi yang kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR dengan masyarakat terkait Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerja Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan maksimal.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pendapat George C. Edward III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka implementasi kebijakan sulit dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, anggaran, informasi dan fasilitas. Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan tentang kesiapan sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR adalah sebagian besar informan mengatakan sumber daya manusia atau staf yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk menjalankan kebijakan karena memiliki latar belakang pendidikan S1. Sebagian besar informan juga mengungkapkan bahwa penerapan Kebijakan IMB sebagian besar mendukung karena menurut beberapa informan pegawai yang ingin mendirikan bangunan pasti mengurus IMB terlebih dahulu. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng adalah bukan karena minimnya sumber daya manusia yang ada.

Selain sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan sumber daya non manusia seperti fasilitas penunjang, informasi, dan anggaran. Implementasi suatu kebijakan tidak mampu berjalan dengan maksimal jika tidak di tunjang dengan fasilitas atau sumber daya lainnya yang mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa sumber daya non manusia seperti anggaran, fasilitas maupun informasi itu belum memadai. Dari wawancara yang

dilakukan kepada informan terkait ketersediaan fasilitas itu belum cukup karena sebagian pegawai masih menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Dari sumberdaya anggaran juga belum cukup memadai dikarenakan anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan anggaran yang dibutuhkan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng itu adalah kurangnya Fasilitas yang disediakan dan minimnya Anggaran yang ada.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan, sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama.

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada Pihak Dinas PUPR untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan terhadap adanya kebijakan IMB, sebagian besar informan menyatakan sikap mendukung kebijakan tersebut dan menyetujui jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Bentuk dukungan yang diberikan berupa mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan

bangunan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten soppeng sudah mendapatkan dukungan baik dari pimpinan maupun pegawai yang ada di Dinas PUPR.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan kebijakan adalah adanya *Standart Operating Prosedur* (SOP) dan struktur birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyatukan langkah dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada pihak Dinas PUPR terkait struktur birokrasi yang ada, menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Semua informan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Fragmentasi yang terjadi yaitu dilihat dari struktur organisasinya menggambarkan dengan jelas bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi namun tetap adanya saling koordinasi antara bagian.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa SOP dan struktur birokrasi pada Dinas PUPR sudah berjalan dengan baik sehingga pekerjaan antara satu dengan yang lain dapat terkoordinasi dengan baik pula.

Dari penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng terdapat cara dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dengan melihat masalah yang dihadapi kemudian menyusun solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Komunikasi berjalan kurang maksimal, hal tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi yaitu transmisi, Kejelasan dan Konsistensi terkait Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan

Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.

2. Sumberdaya masih belum maksimal, ada tiga indikator sumberdaya yang tidak mendukung yaitu fasilitas yang tidak tersedia dengan baik, Anggaran yang tidak mencukupi serta penyampaian informasi yang belum maksimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng. Sedangkan elemen lainnya seperti staf sudah mencukupi.

3. Disposisi implementor sudah sesuai, dimana disposisi mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan IMB sudah baik, kognisi dan intensitas disposisi implementator sudah baik.

4. Struktur Birokrasi sudah sesuai dengan SOP dan semua pegawai bekerja sesuai dengan tupoksinya dan saling berkoordinasi.

b. Saran

1. Diharapkan kepada pelaksana kebijakan untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun peraturan daerah sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini untuk mematuhi dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan pembangunan yang baik.

c. Implikasi

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng merupakan bukti ilmiah akan pentingnya untuk mengimplemntasikan kebijakan Izin Mendirikan Bngunan agar tercipta tata letak bangunan yang aman dan lahan sesuai dengan peruntukannya

8. Daftar Pustaka

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
Ali, F., & Alam, S. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT Refika Aditama.

Aslinda. (2014). *Model Koalisi Advokasi Dalam Perubahan Kebijakan Tata Ruang di Kota Makasar*. Universitas Hasanundddin Makassar.

Dr.Suaharno, M. S. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak.

Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Kedua). Bumi Aksara.

Hamdi, M. (2013). *Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesi.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (H. T.Gedeona & M. Nurafandi (ed.)). Alfabeta.

N.Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Gadjah Mada University Press.

Nugroho D., R. (2003). *Kebijakan Publik*. PT. Elex Media Komputindo.

Nawawi, I. (2009). *Public policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. CV. Putra Media Nusantara.

Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.

Nur, A. cudai. (2018). *Peranan dan Tantangan Kebijakan Publik*. AGMA.

Nur, A.cudai & Guntur Muhammad. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar